

**EVALUASI INSPEKSI UMUM TERENCANA BERDASARKAN *INTERNATIONAL SAFETY RATING SYSTEM*  
DALAM PENERAPAN *SAFETY PATROL*  
(Studi di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero))**

**Zulfia Nita Jamila**

Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga  
E-mail: zulfianita@gmail.com

**ABSTRACT**

*Planned inspection is one of the efforts made to combat workplace accidents and occupational diseases. One type of planned inspection is planned general inspections, a thorough inspection carried out which includes assessment of the safety and health aspects. This inspection is important to identify the physical condition to compliance of companies that have been set. This study aims to determine the level of compliance with the general planned inspection based on the International Safety Rating System (ISRS) in PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).*

*This research is a cross sectional which is descriptive based on the analysis method. This research was conducted in-depth interviews and a review of documents related to the implementation of planned public inspection in PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) based on the sub-element of planned general inspection in third element ISRS.*

*The results showed that the percentage of the level of fulfillment of general planned inspection in PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) amounted to 85.7%. This sub-element can't be fully achieved due to the absence of identified potential hazard classification and the unavailability of an inspection checklist that is used for each area / structure requiring inspection.*

**Keywords:** *general planned inspection, international safety rating system*

**ABSTRAK**

Inspeksi terencana merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Salah satu jenis dari inspeksi terencana yaitu inspeksi umum terencana yang merupakan inspeksi yang dilakukan secara menyeluruh yang meliputi penilaian terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Inspeksi ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi fisik hingga pemenuhan standar perusahaan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemenuhan inspeksi umum terencana berdasarkan instrumen *International Safety Rating System* (ISRS) di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (PERSERO).

Penelitian ini merupakan penelitian *cross sectional* yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam pada *safety inspector* dan peninjauan dokumen terkait penerapan inspeksi umum terencana di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (PERSERO) berdasarkan sub-elemen inspeksi umum terencana dalam elemen ketiga ISRS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosentase tingkat pemenuhan sub-elemen inspeksi umum terencana di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (PERSERO) adalah sebesar 85,7%. Sub-elemen ini tidak dapat tercapai dengan penuh dikarenakan tidak adanya pengklasifikasian bahaya potensial yang teridentifikasi serta tidak tersedianya *checklist* inspeksi yang digunakan untuk setiap area/struktur yang membutuhkan inspeksi.

**Kata kunci:** *inspeksi umum terencana, international safety rating system*

**PENDAHULUAN**

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan kegiatan produksi di tempat kerja pada berbagai bidang industri, mulai dari sektor bisnis hingga penyedia jasa pelayanan umum (Hughes and Ferrett, 2013). Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dapat memberikan pengaruh kepada setiap kegiatan yang ada dalam suatu pekerjaan. Sehingga, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam tercapainya tujuan dari pekerjaan tersebut. Menurut Suma'mur (2009), keberhasilan tersebut

dapat diraih dengan tercapainya tujuan K3 perusahaan, yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Oleh karena itu, perusahaan harus mendukung terselenggaranya upaya keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencegah terjadinya insiden maupun kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan kerugian, baik kerugian langsung dan/atau tidak langsung.

Di Indonesia, setiap tahunnya terjadi lebih dari 250 juta kecelakaan kerja dan lebih dari 160 juta tenaga kerja mengalami penyakit akibat kerja (ILO, 2013). Tidak hanya itu, *International Labour Organization* (2013) juga mencatat bahwa terdapat

1,2 juta tenaga kerja yang meninggal akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja tersebut. Tingginya angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja ini disebabkan oleh tidak optimalnya pelaksanaan sistem manajemen K3, sehingga hal ini berdampak pada tingginya kerugian perusahaan secara tahunan, baik pada ekonomi maupun sumber daya manusianya. Adapun kerugian ekonomi yang ditimbulkan meliputi biaya langsung dan tidak langsung, antara lain kebutuhan biaya medis, hilangnya hari kerja, berkurangnya produksi, hilangnya kompensasi untuk tenaga kerja, biaya pelatihan ulang, perbaikan kerusakan peralatan, serta hilangnya kontrak karena kelalaian (ILO, 2013).

Menurut *International Labour Organization* (2013), salah satu upaya dalam mengurangi serta menanggulangi kejadian kecelakaan dan penyakit akibat kerja adalah dengan menerapkan peraturan perundangan di tempat kerja, antara lain melalui: a) penerapan ketentuan dan syarat K3 yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi (*up to date*); b) penerapan ketentuan dan syarat K3 yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahap perencanaan; c) pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan langsung di tempat kerja.

Berdasarkan ketiga upaya tersebut, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 di tempat kerja merupakan komponen terpenting dalam memastikan bahwa aspek K3 telah diterapkan dengan baik pada seluruh kegiatan dalam suatu pekerjaan. Pengawasan dan pemantauan melalui pemeriksaan langsung ini disebut sebagai inspeksi K3 di tempat kerja, yang mana memberikan peranan penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan insiden dan/atau kecelakaan kerja. Inspeksi merupakan salah satu bentuk evaluasi dalam sistem manajemen K3 yang bertujuan untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan terhadap kondisi maupun tindakan substandar. Inspeksi K3 harus ditetapkan dan dijaga konsistensinya agar dapat terkontrol dengan baik, antara lain meliputi personel yang kompeten, catatan inspeksi, peralatan dan metode pengujian, tindakan perbaikan terhadap kondisi dan/atau tindakan substandar, penyelidikan insiden, serta analisis dan tinjauan ulang terhadap temuan (Katindo Megah Utama, 2015).

PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan, perbaikan, dan pembangunan kapal yang memiliki risiko dan bahaya yang besar. Berdasarkan data laporan kecelakaan PT. DPS (Persero) seperti yang terlihat dalam Tabel 1, setiap tahunnya selalu terjadi kecelakaan kerja mulai dari tingkat ringan hingga berat yang mana mengalami kenaikan pada tahun 2015. Kecelakaan ini disebabkan oleh timbulnya kondisi dan/atau tindakan substandar seerti tidak

memakai alat pelindung diri saat bekerja. Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan insiden dan kecelakaan kerja tersebut, PT. DPS (Persero) telah menerapkan inspeksi K3 bernama *safety patrol*. Inspeksi ini bertujuan untuk melakukan identifikasi ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan K3 dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan di seluruh area produksi PT. DPS (Persero). Namun, sesuai dengan data kecelakaan yang ada, maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan inspeksi tersebut, khususnya inspeksi umum terencana, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kembali yang berakibat pada kerugian langsung maupun tidak langsung.

**Tabel 1.** Data Jumlah Kecelakaan di PT. DPS (Persero) pada Tahun 2013-2015

Tingkat Kecelakaan	Tahun		
	2013	2014	2015
Meninggal	0	0	0
Berat	0	0	1
Sedang	1	1	3
Ringan	2	1	1
<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

*International Safety Rating System* merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan inspeksi umum terencana di tempat kerja. ISRS merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengukur efektivitas prosedur keselamatan dan kesehatan kerja suatu perusahaan (DNV GL, 2014). ISRS ini adalah instrumen yang berskala internasional, sebab telah mengacu pada berbagai peraturan perundangan internasional mengenai K3 (Top, 2012). Penggunaan ISRS sebagai instrumen evaluasi terhadap inspeksi umum terencana dalam penerapan *safety patrol* di PT. DPS (Persero) ini sesuai, sebab jasa PT. DPS (Persero) tidak hanya digunakan oleh konsumen nasional, melainkan juga internasional. Sehingga, membutuhkan penilaian yang berskala internasional untuk mencapai hasil yang optimal.

## TUJUAN PENELITIAN

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan inspeksi umum terencana berdasarkan ISRS dalam penerapan *safety patrol* di PT. DPS (Persero). Sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan inspeksi umum terencana pada *input*, proses, dan *output* dalam penerapan *safety patrol* di PT. DPS (Persero).

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan waktu pelaksanaan penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *cross sectional* yang bersifat observasional. Berdasarkan metode analisis, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) (Persero) pada bulan

Maret-Mei 2016. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan data primer terhadap empat orang *safety inspector* yakni melalui wawancara berdasarkan instrumen ISRS dan pengambilan data sekunder melalui peninjauan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan inspeksi umum terencana di PT. DPS (Persero).

Data primer dalam penelitian ini merupakan data hasil wawancara dengan empat orang *safety inspector* berdasarkan *checklist* dalam sub-elemen inspeksi umum terencana pada elemen ketiga ISRS. Sub-elemen inspeksi umum terencana ini terdiri dari tujuh poin penilaian, yang terdiri dari identifikasi area inspeksi dan personel yang bertanggung jawab, pelaksanaan inspeksi pada seluruh area yang membutuhkan inspeksi, pelaporan kondisi dan/atau tindakan substandar secara tertulis, pengamatan kondisi dan tindakan substandar, pelaporan kondisi dan/atau tindakan substandar secara lisan, pengklasifikasian bahaya potensial, serta pembaruan *checklist* inspeksi. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi umum terencana berdasarkan instrumen ISRS tersebut.

Analisis data dilakukan secara deskriptif terhadap data primer dan sekunder yang telah didapatkan. Sebelumnya, dilakukan pemeriksaan data primer apakah telah sesuai dengan data sekunder yang ada untuk mengetahui valid atau tidaknya data. Kemudian, dilakukan penilaian terhadap sub-elemen inspeksi umum terencana dalam ISRS berdasarkan data yang telah diambil. Adapun total nilai yang didapat apabila seluruh kriteria terpenuhi adalah 140. Penilaian ini dilakukan dengan cara memberi nilai penuh bila jawaban Ya dan 0 bila jawaban Tidak. Selanjutnya dilakukan perhitungan prosentase tingkat pemenuhan dengan membagi perolehan nilai dengan total nilai dari sub-elemen inspeksi umum terencana. Analisis dilakukan secara deskriptif terhadap *input*, proses, dan *ouput* dari sistem *safety patrol* di PT. DPS (Persero). Adapun yang termasuk ke dalam *input* adalah sumber daya manusia dan peralatan inspeksi. Proses terdiri dari pelaksanaan inspeksi umum terencana, sedangkan *ouput* terdiri dari laporan inspeksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Data Input

Data *input* terdiri dari sumber daya manusia dan peralatan inspeksi. Berdasarkan sub-elemen inspeksi umum terencana dalam ISRS, data *input* meliputi dua poin penilaian. Sumber daya manusia dalam penelitian ini meliputi satu poin penilaian, yaitu personel yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan inspeksi. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa personel yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan inspeksi merupakan *safety inspector*, yang mana dua orang telah tersertifikasi sebagai ahli K3 umum. Namun, keduanya belum pernah mendapatkan pelatihan secara formal

mengenai teknik inspeksi. Berdasarkan ISRS, penanggung jawab pelaksanaan inspeksi ini harus memiliki keahlian dan kemampuan dalam mengidentifikasi bahaya, standar fisik, klasifikasi bahaya dan manajemen inspeksi, pelaporan, serta tindak lanjut. Oleh karena itu, harus dilakukan pelatihan khusus secara formal dengan durasi sedikitnya empat jam. Hal ini belum dilakukan oleh personel inspeksi di PT. DPS (Persero), sehingga dalam poin penilaian ini tidak mendapatkan nilai penuh, yakni mendapatkan nilai 10.

Peralatan inspeksi terdiri dari *checklist* inspeksi yang digunakan dan daftar area/struktur yang membutuhkan inspeksi. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan bahwa dalam pelaksanaan *safety patrol* tidak lagi menggunakan *checklist* yang pernah digunakan sebelumnya sejak tahun 2014. *Checklist* tersebut berisi 12 item pemeriksaan yang meliputi kegiatan sebelum hingga sesudah pekerjaan selesai dilakukan seperti yang terlihat pada Gambar 1. Adapun catatan inspeksi yang digunakan saat ini yaitu berupa form ketidaksesuaian, yang berisi temuan kondisi dan tindakan substandar serta bahaya yang ditimbulkan. Form akan diberikan sebagai bentuk peringatan untuk segera memperbaiki kondisi dan tindakan substandar yang ditemukan agar dapat mengurangi atau menghilangkan risiko bahaya yang ada. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *checklist* dan tidak diperbarui setiap adanya perubahan pada fasilitas, peralatan, dan proses kerja. Sesuai dengan ISRS, seharusnya setiap area harus dievaluasi salah satunya berdasarkan *checklist* inspeksi yang digunakan. Oleh karena itu, dalam poin penilaian ini PT. DPS (Persero) mendapatkan nilai nol.

PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)  
 Jl. Tanjung Perak Barat No. 433-435, Surabaya 60165  
 P. +62 31 3291286, F. +62 31 3291659/3291172,  
 E. wecare@dok-sby.co.id, http://www.dok-sby.co.id

**CHECKLIST PATROLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Lokasi : \_\_\_\_\_  
 Jenis Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
 Hari/Tanggal : \_\_\_\_\_  
 Waktu : \_\_\_\_\_  
 Inspektur : \_\_\_\_\_

No	Item yang diperiksa	Sesuai			Keterangan
		Ya	Tdk	N/A	
1	Proyek melakukan meeting K3 yang melibatkan semua pekerjaanya sebelum melakukan pekerjaan, juga menyimpan catatannya				
2	Proyek menyediakan peralatan keselamatan kerja untuk semua pekerjaanya				
3	Setiap pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri, sebagai berikut:				
	a. Safety belt/full body harness: untuk pekerjaan di ketinggian > 2 m				
	b. Helmnet: jika ada potensi terkena benda jatuh atau benturan benda keras				
	c. Kacamata: jika melakukan pekerjaan yang menghasilkan percikan api, debu dan bahan kimia				
	d. Safety shoes: jika ada potensi bahaya jatuh atau benda tajam				
	e. Sarung tangan: jika ada potensi bahaya terkena benda tajam atau bahan kimia				
	f. Pelindung pendengaran: jika bekerja di area bising				
	g. Pelindung pernafasan: jika bekerja di area berdebu dan bahan berbahaya dan beracun				
4	Scaffolding atau tangga: jika bekerja di ketinggian lebih dari 2 meter				
5	Pekerja yang menghasilkan percikan api mampu menggunakan APAR untuk mengantisipasi jika terjadi kebakaran				
6	Tabung-tabung gas bertekanan (oksigen, LPG, dll) disimpan dalam posisi berdiri dan dikat pada konstruksi yang kuat dan tidak dibiarkan dalam kondisi bebas				
9	Pihak kontraktor menyediakan peralatan P3K untuk pekerjaanya untuk digunakan jika terjadi kecelakaan				
10	Setiap pekerjaan kontraktor ditandai dengan "Gedang Ada Pekerjaan" dan dilengkapi dengan barikade/pembatas				
11	Pengambilan sumber listrik dari panel dilakukan dengan cara-cara yang aman dan tidak mengganggu kegiatan proyek				
12	Setiap selesai melakukan pekerjaan, lingkungan kerja dibersihkan kembali sehingga tidak kotor dan berantakan				

Inspektur, \_\_\_\_\_  
Tgl: \_\_\_\_\_

No. Form : FMR.004/SAF.16 (Rev-0)

Gambar 1. Checklist Inspeksi PT. DPS (Persero)

**Data Proses**

Data proses merupakan pelaksanaan dari inspeksi umum terencana itu sendiri. Proses terdiri dari tiga poin penilaian, antara lain proses identifikasi area inspeksi dan item pemeriksaan, pelaksanaan inspeksi umum terencana pada seluruh area inspeksi, serta pengklasifikasian kondisi dan tindakan substandar sebagai bahaya potensial.

Berdasarkan hasil wawancara dan peninjauan prosedur *safety patrol*, pelaksanaan inspeksi umum terencana dalam *safety patrol*

diawali dengan identifikasi terhadap area dan item pemeriksaan oleh P2K3 yang akan menghasilkan *checklist* inspeksi. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut akan ditentukan frekuensi atau jadwal inspeksi terhadap masing-masing area yang diinformasikan kepada seluruh bagian terkait oleh P2K3. Inspeksi ini dilakukan di seluruh area produksi yang ada di PT. DPS (Persero), antara lain meliputi enam bengkel, empat *floating dok*, dan dua *boarding board* sesuai dengan yang tercantum dalam Tabel 2. Adapun personel yang menjadi penanggung jawab inspeksi telah ditentukan, yaitu manajer dari masing-masing area inspeksi. Sehingga, poin penilaian ini mendapatkan nilai penuh.

Berdasarkan data primer dan sekunder yang ada, kondisi dan tindakan substandar yang telah dicatat tidak diklasifikasikan sebagai bahaya potensial sesuai dengan yang dianjurkan dalam ISRS. Oleh karena itu, poin ini tidak mendapatkan penilaian. Berdasarkan ISRS, sistem klasifikasi hazard dapat membantu manajer untuk mengatur prioritas tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan seluruh hazard yang teridentifikasi. Salah satu sistem klasifikasi hazard yang ada adalah sebagai berikut:

**Kelas A (Major)** – Suatu kondisi atau tindakan dapat menyebabkan kecacatan permanen, kematian atau kehilangan anggota badan, dan/atau kerugian material yang besar.

**Kelas B (Serious)** – Suatu kondisi atau tindakan dapat menyebabkan luka serius, dapat mengakibatkan kecacatan sementara, atau kerusakan properti yang kacau namun tidak separah Kelas A.

**Kelas C (Minor)** – Suatu kondisi atau tindakan dapat menyebabkan kecelakaan ringan, luka tanpa cacat, dan/atau kerusakan properti ringan.

**Tabel 2.** Hasil Evaluasi Inspeksi Umum Terencana Berdasarkan ISRS dalam Penerapan *Safety Patrol* di PT. DPS (Persero)

No	Poin Penilaian	Ya	Tidak	Nilai	Total Nilai	
1	Perusahaan menggunakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi (10/20):					
	1. Seluruh area/struktur yang membutuhkan inspeksi umum terencana	Ya		10		
	2. Hal spesifik yang berkaitan di setiap area/struktur yang membutuhkan inspeksi	Ya		10	20	
	1.1 Personel yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan inspeksi umum terencana telah menerima pelatihan tentang teknik inspeksi (PJ-15)	Ya		10	10	
2	Inspeksi umum terencana telah dilaksanakan pada seluruh area/struktur yang membutuhkan inspeksi (Poin maksimal 50)					
	Area/struktur inspeksi	Penanggung jawab telah ditunjuk	Frekuensi ditetapkan	Inspeksi dilakukan	Checklist pemeriksaan digunakan	
	Bengkel HC Utara	Ya	Ya	Ya	Ya	
	Bengkel HC Selatan	Ya	Ya	Ya	Ya	
	Bengkel Listrik	Ya	Ya	Ya	Ya	
	Bengkel Pipa	Ya	Ya	Ya	Ya	
	Bengkel Limbung	Ya	Ya	Ya	Ya	
	Bengkel Mesin	Ya	Ya	Ya	Ya	
	<i>Floating dok 1</i>	Ya	Ya	Ya	Ya	
	<i>Floating dok 2</i>	Ya	Ya	Ya	Ya	
	<i>Floating dok 3</i>	Ya	Ya	Ya	Ya	
	<i>Floating dok 4</i>	Ya	Ya	Ya	Ya	
	<i>Boarding board 1</i>	Ya	Ya	Ya	Ya	
	<i>Boarding board 2</i>	Ya	Ya	Ya	Ya	50
3	Seluruh kondisi substandar telah diamati dan dilaporkan secara tertulis (XO-20)		Ya		20	20
4	Seluruh tindakan substandar telah diamati dan dilaporkan secara tertulis (XO-10)		Ya		10	10
5	Pengakuan diberikan secara lisan dan dilaporkan secara tertulis apabila kondisi dan tindakan substandar diamati selama inspeksi umum terencana (XO-10)		Ya		10	10
6	Seluruh kondisi dan tindakan substandar dicatat dan diklasifikasikan sebagai bahaya potensial (XO-10)			Tidak	0	0
7	<i>Checklist</i> inspeksi dan daftar area/struktur yang membutuhkan inspeksi diperbarui setiap adanya perubahan pada fasilitas, peralatan, dan proses kerja (XO-5)			Tidak	0	0
<b>Total Nilai</b>					<b>120</b>	
<b>Prosentase Tingkat Pemenuhan (120/140) x 100% = 85,7%</b>						

### Data Output

Data *output* terdiri dari laporan hasil inspeksi umum terencana. Data *output* meliputi tiga poin penilaian, yaitu mengenai pelaporan kondisi dan tindakan substandar secara tertulis dan lisan. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan bahwa telah dilakukan pelaporan secara tertulis mengenai kondisi dan tindakan substandar yang ditemukan selama inspeksi. Pencatatan kondisi dan tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan form ketidaksesuaian yang digunakan petugas saat inspeksi. Form ketidaksesuaian tersebut ditujukan kepada bagian terkait mengenai temuan ketidaksesuaian tersebut. Adapun form yang digunakan yaitu dokumen Format Peringatan K3. Pelaksana inspeksi akan menuliskan pelanggaran terhadap prosedur K3 yang ditetapkan oleh perusahaan pada suatu pekerjaan/bagian yang ditemukan pada saat pelaksanaan inspeksi. Form ini ditujukan kepada pekerja yang bertanggung jawab terhadap area kerja dimana kondisi dan/atau tindakan substandar ditemukan. Adapun data yang dicantumkan dalam form peringatan ini meliputi proyek, jenis pekerjaan, lokasi, dan waktu (tanggal dan jam) penemuan kondisi dan/atau tindakan substandar.

Pelaporan kondisi dan tindakan substandar tidak hanya dilakukan secara tertulis, melainkan juga disampaikan secara lisan oleh petugas inspeksi pada saat QSH *meeting* dan nantinya dilaporkan kembali dalam bentuk tulisan oleh P2K3 berdasarkan hasil pelaporan dalam QSH *meeting* tersebut.

### Evaluasi Inspeksi Umum Terencana dalam Penerapan *Safety Patrol*

Penilaian terhadap sub-elemen inspeksi umum terencana bertujuan untuk memastikan bahwa inspeksi umum terencana dilaksanakan secara reguler terhadap seluruh area dari fasilitas yang telah dinilai. Berdasarkan hasil penilaian, didapatkan bahwa inspeksi umum terencana yang diterapkan di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (PERSERO) mendapatkan prosentase tingkat pemenuhan sebesar 85,7% dengan nilai 120 dari nilai maksimal 140 dengan rincian penilaian pada Tabel 2. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan inspeksi umum terencana yang dilakukan sebagian besar telah sesuai dengan kriteria penilaian dalam *International Safety Rating System*.

### SIMPULAN

Berdasarkan penilaian terhadap inspeksi umum terencana dalam penerapan *safety patrol* mulai dari *input*, proses, hingga *output* di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (PERSERO) menggunakan instrumen *International Safety Rating System*, dapat disimpulkan bahwa PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (PERSERO) telah memenuhi 85,7% dari seluruh kriteria penilaian yang ada pada sub-elemen inspeksi umum terencana dalam ISRS. Sub-elemen

ini tidak dapat tercapai dengan penuh dikarenakan tidak adanya pengklasifikasian bahaya potensial yang teridentifikasi serta tidak tersedianya *checklist* inspeksi yang digunakan untuk setiap area/struktur yang membutuhkan inspeksi, sehingga pada kedua poin penilaian tersebut mendapatkan nilai 0.

Berdasarkan penilaian tersebut, adapun saran yang dapat peneliti berikan antara lain:

1. Personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan inspeksi umum terencana seharusnya menerima pelatihan formal tentang teknik inspeksi sekurang-kurangnya selama empat jam.
2. Seluruh kondisi dan tindakan substandar yang teridentifikasi seharusnya dicatat dan diklasifikasikan sebagai bahaya potensial.
3. PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (PERSERO) seharusnya tetap memberlakukan *checklist* inspeksi dan memperbaruinya setiap ada perubahan pada fasilitas, peralatan, maupun proses kerja.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bird, Frank E., dan R.H. Ramsay. 1994. **International Safety Rating System**. Georgia: International Loss Control Institute (USA).
- DNV GL. 2014. **Business Assurance: ISRS, for the health of your business**. [Diakses 21 Oktober 2015]. <http://dnvglcert.com>.
- Hughes, Phil & Ferrett, Ed. 2013. **International Health and Safety at Work: for the NEBOSH International General Certificate**. Routledge.
- International Labour Organization (ILO). 2013. **Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Sarana untuk Produktivitas**. Pedoman Pelatihan untuk Manajer dan Pekerja. Jakarta: International Labour Office. [Diakses 21 Oktober 2015]. [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_23765\\_0.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_23765_0.pdf).
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3.
- Setiyono. 2012. **Pemenuhan Tindak Lanjut Inspeksi Umum Terencana pada Section Plant di PT. Bukit Makmur Mandiri Utama Jobsite Lanna Harita Indonesia Samarinda, Kalimantan Timur**. [Diakses 22 Februari 2016]. <https://dglib.uns.ac.id/dokumen/download/26696/NTY1Nzg=/Pemenuhan-Tindak-Lanjut-Inspeksi-Umum-Terencana-pada-Section-Plant-di-PT-Bukit-Makmur-Mandiri-Utama-Jobsite-Lanna-Harita-Indonesia-Samarinda-Kalimantan-Timur-abstrak.pdf>.
- Suma'mur. 2009. **Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)**. Jakarta: Sagung Seto.

- Tarwaka. 2008. **Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan implementasi K3 di tempat kerja**. Surakarta: Harapan Press.
- Top, Willem N. 2012. **Safety and Loss Control and the International Safety Rating System (ISRS)**. [Diakses 21 Oktober 2015].
- <http://www.topves.nl/PDF/Safety%20Management%20and%20the%20ISRS.pdf>.
- Top, Willem N. 2015. **Het Offshore Blad: International Safety Rating**. [Diakses 28 Desember 2015].
- <http://www.topves.nl/PDF/ISRS%20-%20Offshore.PDF>